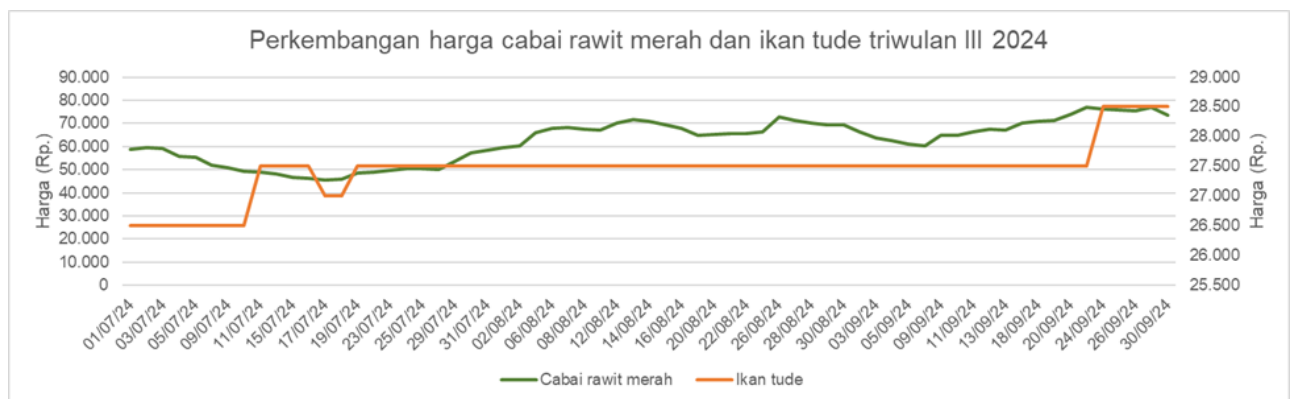


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Pada triwulan III tahun 2024, inflasi tahun ke tahun (yoy) di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 3,66%, mengalami penurunan dibandingkan dengan angka 4,42% di triwulan II tahun 2024. Secara bulan ke bulan (mtm), Sulawesi Utara mengalami deflasi sebesar 0,54% begitu juga dalam tahun berjalan (ytd) terjadi deflasi sebesar 0,11%.
- Untuk daerah yang masuk dalam pencatatan IHK, keempat daerah mengalami deflasi month-to-month. Deflasi terdalam terjadi di Minahasa Utara sebesar 1,67% diikuti Minahasa Selatan 1,08%, Kotamobagu 0,35% dan terakhir Manado sebesar 0,07%. Secara year-on-year seluruh daerah IHK mengalami inflasi, tertinggi di Minahasa Selatan sebesar 6,31% dan terendah di Manado sebesar 2,61%. Untuk Kotamobagu dan Minahasa Utara, masing-masing sebesar 4,06% dan 4,83%.
- Inflasi bulan ke bulan Sulawesi Utara didorong oleh kelompok transportasi khususnya angkutan udara sebesar 0,13% diikuti oleh beberapa komoditas dari kelompok makanan minuman dan tembakau yaitu cabai rawit (0,13%), ikan malalugis/ikan sorihi (0,05%), bawang merah (0,04%) dan ikan selar/ikan tude (0,04%). Kelompok makanan dan tembakau sendiri secara total mengalami deflasi dengan andil 0,82 yang disebabkan oleh komoditas tomat (-0,46%), daging ayam ras (-0,10%) daun bawang (-0,10%), kangkung (-0,09%) dan air kemasan (-0,07%).



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan tarif angkutan udara merupakan bagian dari normalisasi harga setelah berakhirnya periode promosi atau diskon yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan selama masa liburan sekolah dan Idul Adha. Sementara itu, penurunan pasokan cabai rawit disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari luar Sulawesi Utara, khususnya dari Provinsi Gorontalo, serta karena sebagian besar lahan cabai rawit lokal belum memasuki masa panen. Selain itu, kendala distribusi di beberapa titik akibat perbaikan infrastruktur turut memengaruhi ketersediaan cabai rawit. Di sisi lain, kenaikan harga ikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan fase bulan purnama yang membatasi waktu melaut nelayan, sehingga mengurangi hasil tangkapan ikan. Selain itu, kenaikan dipengaruhi oleh adanya perayaan Pengucapan Syukur di wilayah Minahasa Raya, Manado, Tomohon dan Bitung.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi Juli 2024

- Rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Prov. Sulut, 10 Juli 2024;
Penandatanganan KAD antara Kota Manado dengan Kab. Pohuwato untuk komoditas bawang merah, cabai rawit/rica, dan tomat (barito) pada 23 Juli
- High Level Meeting TPID Kab. Kepulauan Sangihe pada 14 Juli dan penanaman Padi pada 20 Juli 2024;
- Pengendalian ekspektasi melalui diseminasi kebijakan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pada program Mozaik Indonesia di RRI Sulut;
Panen Poktan Palembang (Cabai Merah, Tomat) di Kab. Minahasa;
- Penandatanganan KAD antara Kab. Minahasa Tenggara dan Kab. Bolaang Mongondow Utara pada 12 Juli.
- Pengadaan 750 ekor indukan Babi dari luar daerah oleh PemProv bekerjasama dengan pengusaha Babi.
- Rangkaian GPM dihari Pengucapan di Kab Minsel, Minut, Mitra, Manado, Bitung dan Kotamobagu.

Upaya pengendalian inflasi Agustus 2024

- Sidak Pasar Bersehati Manado, 4, 18 Agustus
Pengadaan 823 ekor Babi dari Bali oleh PemProv bekerjasama dengan pengusaha Babi.
- Gerakan Pangan Murah TPID Sulut, 15 & 23 Agustus
Pemantauan ketersediaan stok Beras di gudang BULOG dilanjutkan dengan press release kepada wartawan untuk diseminasi ketersediaan pasokan, 18 Agustus
- Rapat Koordinasi Mingguan TPID Prov. Sulut
Sidak Pasar 23 Maret dan Pemantauan stok beras di gudang BULOG Kotamobagu, 24 Agustus
- Kunjungan ke checkpoint Bolmut dan Bolsel untuk membuka peluang perolehan data distribusi pangan via darat, 24 Agustus

Upaya pengendalian inflasi September 2024

- Peninjauan terkait ketersediaan bahan Pangan di Gudang Perum Bulog Sub Divre Bolaang Mongondow 3 September;
- Penyaluran beras CBP pada Keluarga Penerima Manfaat di Sulut dengan target 151.899 KPM dan 1.519 ton per bulan dengan capaian 100%.;
Gelar Pangan Murah dalam rangka HUT Provinsi Sulut di 17 titik (6-10 September)
- Penyerahan bantuan berupa Sarpras Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2024 untuk kelompok Nelayan/Perikanan, di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan, 14 September
- High Level Meeting TPID dan TP2DD Kab. Kepl. Sangihe, 18 September
Pencanangan DESA CANTIK (Desa Cinta Statistik), Desa Watudambo 2 Kecamatan Kauditan, 18 September
- Berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga mengenai penyediaan LPG 3 GPM oleh TPID Minahasa Utara di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat, 18 September
- GPM oleh TPID Minahasa Utara di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan, 24 September
- Rapat Koordinasi Mingguan TPID Prov. Sulut

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah bekerja sama secara efektif dalam memantau dan mengevaluasi upaya pengendalian inflasi, baik pada tahap produksi dan pasokan di hulu, maupun dalam distribusi bahan pokok dan barang strategis lainnya di hilir. Setiap minggu, Pemerintah Daerah secara rutin mengadakan pertemuan koordinasi untuk mengikuti perkembangan harga di pasar. Pada bulan Juli, dalam rangka mengantisipasi perayaan Pengucapan, TPID Sulut melalui Dinas Ketahanan Pangan Daerah juga menggelar rapat Gerakan Pangan Murah di beberapa kabupaten di Minahasa Raya kemudian diikuti dengan rapat koordinasi.

Terkait dengan lonjakan harga daging babi, pada bulan Juni Pemerintah Provinsi telah membuka pemasukan daging babi dari luar Sulawesi Utara. Pengadaan pertama dilakukan pada bulan Juli dengan mendatangkan 750 ekor babi dari Bali. Kemudian pada bulan Agustus, kembali didatangkan 823 ekor babi yang terdiri dari 803 ekor siap potong dan 20 ekor babi kecil. Pengadaan ini difasilitasi oleh TPID Provinsi Sulut melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah bekerja sama dengan pengusaha/peternak babi se-Minahasa Raya. Pengadaan ini bertujuan untuk memenuhi stok daging babi Sulawesi Utara yang jauh berkurang akibat belum pulihnya usaha peternakan sebagai dampak virus African Swine Fever (ASF) tahun lalu.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Guna menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Utara, TPID Provinsi akan terus melakukan kerjasama dan koordinasi bersama semua anggota TPID, dengan fokus pada langkah-langkah berikut ini:

- Peningkatan Ketersediaan Pasokan Cabai Rawit. Mengingat potensi kenaikan harga cabai rawit akibat keterbatasan pasokan dan rendahnya frekuensi tanam pada musim hujan, serta adanya peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, TPID Sulawesi Utara diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pasokan cabai rawit secara lokal. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak signifikan dari lonjakan harga pada akhir tahun.
- Antisipasi Kenaikan Inflasi Komoditas Perikanan Akibat Cuaca La Nina. Kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh La Nina berpotensi menghambat produksi komoditas perikanan sehingga meningkatkan harga. TPID Sulut disarankan menyiapkan strategi antisipasi terhadap fluktuasi harga komoditas perikanan sebagai dampak dari penurunan pasokan akibat cuaca buruk.
- Pemantauan Pasokan dan Inflasi Komoditas Strategis Lainnya. Panen beberapa komoditas pangan seperti tomat, daun bawang, dan daging ayam ras yang diprediksi berlangsung hingga Oktober diperkirakan dapat menahan laju inflasi. Namun, TPID Sulut perlu memantau stabilitas pasokan untuk memastikan keberlanjutannya hingga akhir tahun, khususnya bagi komoditas strategis yang cenderung mengalami gejolak harga seperti cabai rawit dan daging babi.
- Penyusunan Strategi Distribusi untuk Mengantisipasi Kenaikan Permintaan Akhir Tahun. Untuk menghindari lonjakan harga akibat kenaikan permintaan pada akhir tahun, TPID Sulut diimbau untuk menyusun strategi pemenuhan pasokan dan/atau kelancaran distribusi yang efektif bagi komoditas-komoditas yang mengalami permintaan tinggi.
- Optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar. Gerakan pangan murah dan operasi pasar diharapkan menjadi instrumen stabilisasi harga selama periode HBKN. Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaannya, gerakan ini disarankan untuk dilaksanakan di pasar atau pusat perbelanjaan yang menjadi lokasi sampel pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Optimalisasi Anggaran dan Alokasi Dana Desa untuk Pengendalian Inflasi. TPID Sulut diharapkan terus mengoptimalkan anggaran pengendalian inflasi, termasuk mendorong penggunaan alokasi dana desa untuk program penguatan ketahanan pangan daerah. Dengan langkah ini, diharapkan ketersediaan pangan lokal semakin terjamin dan dapat menekan potensi inflasi di masa mendatang.